

---

## DIGITAL INOVASI SEKTOR PUBLIK : EFEKTIVITAS KOLABORASI DALAM IMPLEMENTASI INOVASI DESA DIGITAL

**Deby Febriyan Eprilianto, Galih Wahyu Pradana, dan Yuyun Eka Kartika Sari**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
debyepriyanto@unesa.ac.id

### **Abstract**

*The success of innovation in the private sector has provided an injection of enthusiasm for the public sector in managing its various innovations. Therefore the position and position of an innovation is very important in the public sector to be able to improve the quality of public services to the community. This study aims to describe and analyze the effectiveness in the implementation of the Village Information System (SID) in the Government of Dlingo Village, Dlingo District, Bantul Regency, Yogyakarta Special Region Province. SID is a digital innovation in the public sector that was developed internally by the Dlingo Village Government. This research was conducted at the Dlingo Village Government, Data and Telematics Management Office (KPDT) of the Bantul Regency Government, Combine Resource Institutions (CRI). The method used in this research is descriptive qualitative through interviews, observations, and documentation. The results of the research conducted show that the development of SID in the Dlingo Village Government has been carried out since 2006 and was first implemented in 2009. There are several effectiveness of SID implementation in the Dlingo Village Government. The effectiveness includes, among others, a) the successful achievement of goals or objectives consisting of improving village data management, improving public services and increasing information disclosure, b) improving relations between organizations which consist of improving relations and cooperation in other sectors and establishing and reactivating community institutions village, and c) organizational development consisting of increasing the capacity of village officials and developing village potential. This study provides recommendations including: a) KPDT encourages every village government to be actively involved in the application of digital village programs, b) KPDT conducts intensive and periodic mentoring and monitoring, c) KPDT and CRI encourage increased community accessibility to technology, and d) cooperating with various parties to encourage the integration of village data.*

**Keywords: Innovation in the Public Sector, Effectiveness, and Digital Villages**

### **Abstrak**

Kesuksesan inovasi dalam sektor swasta telah memberikan suntikan semangat bagi sektor publik dalam mengelola berbagai inovasinya. Oleh karena itu posisi dan kedudukan akan suatu inovasi sangatlah penting dalam sektor publik untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID) pada Pemerintah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SID merupakan salah satu digital inovasi dalam sektor publik yang dikembangkan secara internal oleh Pemerintah Desa Dlingo. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Dlingo, Kantor Pengelolaan Data dan Telematika (KPDT) Pemerintah Kabupaten Bantul, *Combine Resource Institutions* (CRI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa pengembangan SID pada

Pemerintah Desa Dlingo telah dilakukan sejak tahun 2006 dan diterapkan pertama kali pada tahun 2009. Terdapat beberapa efektivitas implementasi SID pada Pemerintah Desa Dlingo. Efektivitas tersebut antara lain yaitu a) keberhasilan pencapaian sasaran atau tujuan yang terdiri dari perbaikan manajemen data desa, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan keterbukaan informasi, b) peningkatan hubungan antar organisasi yang terdiri dari peningkatan hubungan dan kerjasama sektor lain dan pembentukan dan pengaktifan kembali lembaga masyarakat desa, dan c) pengembangan organisasi yang terdiri dari peningkatan kapasitas perangkat desa dan pengembangan potensi desa. Penelitian ini memberikan rekomendasi antara lain yaitu a) KPDT mendorong setiap pemerintah desa untuk terlibat aktif dalam penerapan program desa digital, b) KPDT melakukan pendampingan dan monitoring secara intensif dan berkala, c) KPDT dan CRI mendorong peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi, dan d) melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong terjadinya integrasi data desa.

**Kata Kunci : Inovasi dalam Sektor Publik, Efektivitas, dan Desa Digital**

## PENDAHULUAN

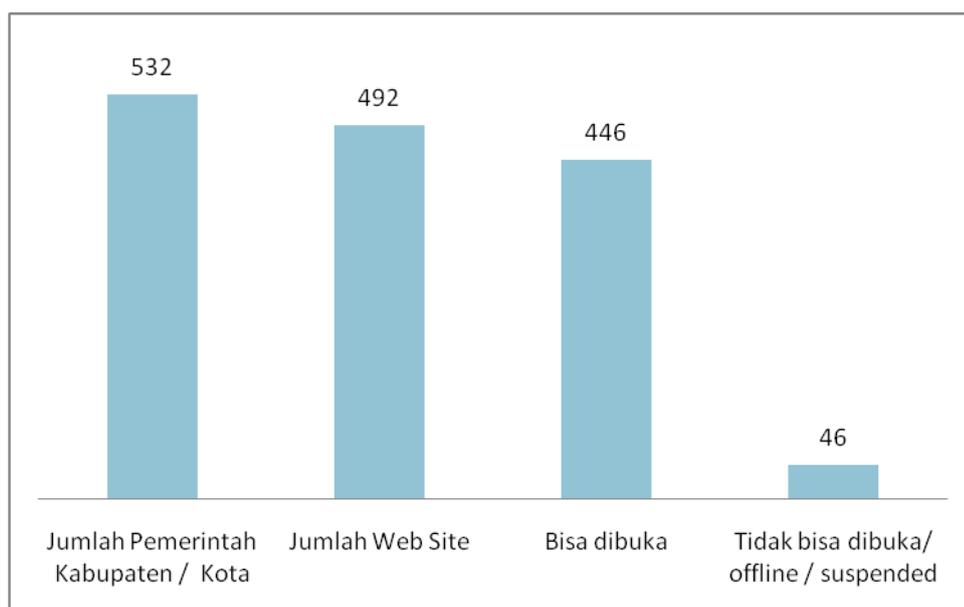
Inovasi saat ini menduduki posisi yang sangat strategis dalam sektor publik. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan sektor swasta dalam mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi untuk melayani pelanggannya. Keberhasilan inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi sektor publik untuk dapat mengembangkan berbagai macam inovasi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Perkembangan yang terjadi pada sektor publik menunjukkan bahwa inovasi tidak dapat terpisahkan dengan kemajuan pesat yang terjadi pada Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga konsep inovasi erat kaitannya dengan konsep *e-government* (Safeena dan Abdullah, 2013). Kondisi ini menyebabkan banyaknya instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah bahkan sampai pada level pemerintah desa mengupayakan pengembangan dan penerapan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan aktivitas administrasi publik.

Implementasi praktik *electronic government* di Indonesia sangatlah beragam. Implementasi *electronic government* diawali dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*. Kebijakan ini menjelaskan bahwa implementasi *electronic government* di Indonesia memiliki tujuan untuk melakukan perubahan dalam sistem manajemen pada sektor publik yang dulu bersifat sektoral atau tradisional menjadi lebih modern, sehingga mampu memperpendek alur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sektor publik. Kebijakan tersebut juga membuka jalan untuk melakukan perubahan pada sektor publik dalam hal interaksi antara sektor publik dan sektor swasta yang dulunya seakan terpisah dan terbatas menjadi lebih luwes dan fleksibel, sehingga akan membuka jalan untuk mendorong terjadinya berbagai skema kemitraan antara sektor swasta dan sektor publik (Indrajit, 2002). Oleh karenanya jika sektor publik dapat menjadikan kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan dan implementasi *electronic*

*government* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi *collaborative governance* (Dewanto, 2015).

Implementasi *electronic government* di Indonesia sangatlah beragam dari instansi pemerintah pusat sampai pada instansi pemerintah daerah, bahkan instansi pemerintah desa/kelurahan (Rokhman, 2011). Hal ini disebabkan oleh keleluasaan setiap instansi pemerintah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan *electronic government*. Meskipun demikian perkembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia masih sebatas penerapan *website* pada instansi pemerintah. Pada awal perkembangannya setiap instansi pemerintah seolah-olah berlomba-lomba dalam melakukan pengembangan *website* pada instansinya masing-masing. Meskipun demikian selaras dengan perkembangan yang terjadi saat ini, instansi pemerintah mulai mengembangkan berbagai macam aplikasi (Rahman, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran pola pengembangan yang mulanya berbasis *website* berubah berbasis aplikasi. Tetapi sayangnya, dalam pengembangannya instansi pemerintah nampaknya masih kurang serius dalam melakukan berbagai pengembangan tersebut. Dimana hampir setiap instansi pemerintah dalam melakukan pengembangan berbagai inovasi berbasis digital terlihat sangat baik hanya pada tahap persiapannya saja. Artinya setiap instansi pemerintah terlihat sangat semangat sekali pada proses pembuatannya saja, tetapi tidak dibarengi dengan proses *update* atau pengelolaan informasinya secara terus-menerus (Eva dan Torfing, 2012). Hal ini terlihat pada data perkembangan jumlah *website* pada instansi pemerintah daerah di Indonesia yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 1. Perkembangan Jumlah Website pada Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2013**



Sumber : Pusedantinkomtel Kemendagri update per Mei 2013

---

Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah instansi pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia sebanyak 532, sedangkan yang memiliki *website* sebanyak 492. Dari data yang ada *website* yang bisa dibuka/diakses sebanyak 446, sedangkan 46 *website* tidak bisa dibuka/diakses. Hal ini menunjukkan bahwa pada instansi pemerintah daerah terlihat kurang optimal melakukan pengembangan *website*. Selanjutnya yang terjadi saat ini implementasi *electronic government* bukan menyoal sebatas mengembangkan *website* pada instansi pemerintah melainkan mulai berkembang menjadi bermacam-macam aplikasi digital yang inovatif. Meskipun dalam pengembangan berbagai inovasi berbasis digital tersebut dilakukan secara mandiri oleh sektor publik maupun melalui berbagai macam skema kerjasama dengan sektor yang lainnya. Hal menarik lainnya yang terjadi yaitu pengembangan inovasi digital telah merambah pada instansi pemerintah yang paling kecil yaitu instansi pemerintah desa, sehingga pengembangan inovasi digital bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah saja (provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu, fenomena inovasi digital yang terjadi tersebut kemudian dikenal dengan konsep SID atau Sistem Informasi Desa. Pengembangan konsep SID tersebut sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Strategi Pengembangan Desa Digital. Meskipun terdapat beberapa pemerintah desa/kelurahan yang jauh sebelum adanya peraturan tersebut telah mengembangkan inovasi digital SID. Berlakunya kebijakan tersebut secara tidak langsung menjadi daya dorong kepada instansi pemerintah desa/kelurahan untuk dapat melakukan pengembangan inovasi desa digital. Dimana hingga tahun 2015 tercatat bahwa di Indonesia terdapat 2.204 desa/kelurahan telah mengembangkan inovasi SID dengan domain desa.id.

Berlakunya peraturan tentang desa digital tersebut, menjadikan inovasi digital pada instansi pemerintah desa memiliki peran dan posisi strategis untuk dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu konsep desa digital atau SID adalah salah satu program yang baru untuk mendorong instansi pemerintah desa memanfaatkan momen perkembangan TIK yang semakin pesat. Antusias instansi pemerintah desa dalam melakukan pengembangan inovasi digital nampaknya mendapat respon yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan pada perkembangan desa digital atau SID di Indonesia yang semakin pesat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan keharusan instansi pemerintah desa untuk mengembangkan desa digital atau SID telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 86. Selanjutnya kebijakan tersebut nampaknya diperkuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Kebijakan tersebut telah mengatur seraca detail terkait dengan pengembangan desa digital atau SID pada setiap instansi pemerintah desa. Respon pemerintah pusat melalui berbagai macam kebijakan yang telah ditetapkan disambut sangat baik oleh instansi pemerintah desa/kelurahan

---

sebagai aktor utama dalam mengembangkan desa digital atau SID. Oleh karenanya dari tahun ke tahun jumlah desa digital atau SID di Indonesia mengalami peningkatan yang baik.

Hal menarik yang terjadi, meskipun sejak tahun 2015 seiring dengan ketetapan kebijakan yang dikeluarkan dalam inovasi desa digital atau SID mulai meningkat, terdapat beberapa pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa/kelurahan jauh sebelumnya telah berhasil mengembangkan konsep yang sekarang ini disebut desa digital atau SID. Pengembangan tersebut ternyata merujuk pada Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Kebijakan lainnya yang menjadi acuan dalam pengembangan desa digital atau SID yaitu Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Open Source Software* (OSS). Dimana sejak adanya ketetapan kebijakan tersebut, terdapat beberapa pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa/kelurahan yang mulai serius dalam melakukan pengembangan desa digital atau SID sebagai wujud untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Meskipun dalam kebijakan tersebut tidak terdapat penjelasan khusus secara jelas terkait dengan pengembangan desa digital atau SID, tetapi beberapa pemerintah desa mempunyai inisiatif untuk mengembangkan berbagai jenis inovasi digital. Salah satu pemerintah daerah yang memiliki inisiatif dalam melakukan pengembangan desa digital atau SID yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul. Dimana jauh sebelum adanya kebijakan khusus tentang pengembangan desa digital atau SID, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan pengembangan dan mengimplementasikan desa digital diseluruh desanya.

Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki inisiatif untuk mengembangkan desa digital atau SID secara mandiri. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sejak tahun 2013 sebagai upaya turut serta mendukung Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 dan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/3/2009. Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul melalui KPDT atau Kantor Pengelolaan Data dan Telematika telah berhasil mengembangkan berbagai jenis inovasi digital, salah satunya aplikasi SID yang diterapkan pada instansi pemerintah desa. Sejak tahun 2013 seluruh instansi pemerintah desa di Kabupaten Bantul yang berjumlah 75 desa telah menerapkan aplikasi SID. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui KPDT dari tahun 2007 telah berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai jenis inovasi digital yang diterapkan pada berbagai sektor sebagai upaya perwujudan turut serta dalam melakukan pengembangan *electronic government* di Indonesia. Meskipun aplikasi SID yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut termasuk pada tahap pengembangan inovasi digital tahap terakhir. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melakukan pengembangan inovasi digital dapat dilihat pada pencapaian jumlah

inovasi digital yang berhasil dikembangkan dan diterapkan. Dimana sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bantul setidaknya telah berhasil mengembangkan sejumlah 44 aplikasi. Aplikasi yang terdiri dari 27 aplikasi yang berhasil dikembangkan untuk sistem informasi pengolahan data internal dan 17 aplikasi yang berhasil dikembangkan untuk sistem informasi publik. Aplikasi-aplikasi yang berhasil dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. Inovasi Digital yang Berhasil Dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul**

Inovasi Digital dalam Sistem Informassi Publik	Inovasi Digital dalam Sistem Informasi Pengolahan Data Internal
1. <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Bantul <a href="http://www.bantulkab.go.id">www.bantulkab.go.id</a>	1. Intranet.bantulkab.go.id
2. <i>Website</i> <a href="http://www.bantulbiz.com">www.bantulbiz.com</a>	2. simdalbangda.bantulkab.go.id
3. <i>Website</i> <a href="http://www.bantulcraft.com">www.bantulcraft.com</a>	3. simbada.bantulkab.go.id
4. <a href="http://perijinan.bantulkab.go.id">perijinan.bantulkab.go.id</a>	4. simkeuda.bantulkab.go.id
5. <a href="http://kewilayahan.bantulkab.go.id">kewilayahan.bantulkab.go.id</a>	5. simrenbang.bantulkab.go.id
6. <a href="http://potensiwisata.bantulkab.go.id">potensiwisata.bantulkab.go.id</a>	6. simnangkis.bantulkab.go.id
7. <a href="http://hukum.bantulkab.go.id">hukum.bantulkab.go.id</a>	7. Sistem Informasi Manajemen Ijin Reklame
8. <a href="http://ipse.bantulkab.go.id">ipse.bantulkab.go.id</a>	8. Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data Pedagang Pasar
9. <a href="http://invesda.bantulkab.go.id">invesda.bantulkab.go.id</a>	9. Sistem Informasi Manajemen BPHTP (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
10. <a href="http://CPNS.bantulkab.go.id">CPNS.bantulkab.go.id</a>	10. Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Penggajian Pegawai Kab. Bantul
11. Standar Harga Barang dan Jasa <a href="http://shbj.bantulkab.go.id">shbj.bantulkab.go.id</a>	11. Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Data SP2D
12. Warung Informasi dan Teknologi <a href="http://warintek.bantulkab.go.id">warintek.bantulkab.go.id</a>	12. Sistem Informasi Manajamen Administrasi Kependudukan
13. Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi sistel. <a href="http://bantulkab.go.id">bantulkab.go.id</a>	13. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Keuangan dan Akuntansi
14. Fasilitas e-Mail	14. e-Audit
15. Sistem Pengendalian Lingkungan	15. e-Office
16. Sistem Informasi Sarana Kesehatan Masyarakat	16. Sistem Informasi Manajemen PATEN
17. Sistem Informasi Potensi Wisata dan Kuliner	17. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan

- 
18. Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan
  19. Sistem Informasi Manajemen Laporan Kesehatan Masyarakat
  20. Sistem Informasi Manajemen PBB Online
  21. Sistem Informasi Manajemen eSakip
  22. Sistem Informasi Manajemen Tanah Desa
  23. Sistem Informasi Manajemen Monografi Desa
  24. Sistem Informasi Manajemen Aset PNPM
  25. Sistem Informasi Manajemen Satuan Polisi Pamong Praja
  26. Sistem Informasi Manajemen Kesiswaan
  27. Sistem Informasi Desa
- 

Sumber : KPDT Pemerintah Kabupaten Bantul, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Bantul telah serius dalam melakukan pengembangan inovasi digital, sehingga jumlah aplikasi yang berhasil dikembangkan dan diterapkan yaitu 44 jenis inovasi digital. Inovasi digital yang berhasil dikembangkan dan diterapkan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaannya. Dari data lapangan menunjukkan bahwa inovasi digital SID termasuk dalam jenis inovasi digital yang ditujukan untuk sistem informasi pengolahan data internal yaitu data desa. Dimana inovasi digital SID ini sebagai respon untuk memenuhi kebutuhan pada setiap pemerintah desa dalam melakukan pengolahan data desanya. Sejak tahun 2014, KPDT telah melakukan pengembangan terhadap inovasi digital SID dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan CRI. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang menjelaskan bahwa dalam upaya pengembangan *electronic government* dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pihak lain. Hasil yang diperoleh melalui kegiatan kolaborasi dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul yaitu telah diterapkannya inovasi digital SID di seluruh desa yaitu 75 desa di Kabupaten Bantul. Meskipun sebelum inovasi digital SID ini diterapkan diseluruh desa di Kabupaten Bantul, sebenarnya Pemerintah Desa Dlingo sejak tahun 2006 telah terlebih dahulu mengembangkan secara mandiri inovasi digital SID yang saat ini telah diterapkan diseluruh desa. Pemerintah Desa Dlingo telah menggandeng CRI dalam melakukan pengembangan dan implementasi inovasi digital pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dlingo merupakan desa pertama yang melakukan pengembangan dan implementasi

---

inovasi digital SID. Dimana saat ini Pemerintah Desa Dlingo ditetapkan sebagai desa percontohan di Kabupaten Bantul dalam hal pengembangan dan implementasi inovasi digital SID. Kesuksesan Pemerintah Desa Dlingo dan CRI dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi digital SID, menjadi daya tarik tersendiri bagi KPDT untuk berinisiatif mengembangkan inovasi digital SID yang dapat diterapkan diseluruh desa di Kabupaten Bantul. Keseriusan tersebut membuahkan hasil dimana seluruh desa yang berjumlah 75 desa di Kabupaten Bantul saat ini telah berhasil menerapkan inovasi digital SID.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kesuksesan pengembangan inovasi digital SID pada Pemerintah Kabupaten Bantul salah satu faktornya yaitu adanya praktik kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bantul melalui KPDT dengan CRI. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap praktik kolaborasi akan memberikan berbagai efektivitas bagi setiap pihak yang terlibat. Terdapat empat efektivitas dalam *collaborative goernance* yaitu a) kebebasan dalam menentukan dan otonomi, dimana akan terjadi kolaborasi aktor-aktor untuk melebur menjadi satu yang awalnya berdiri sendiri-sendiri, b) unit otonom, dimana meskipun melebur terdapat unit otonom dalam organisasi yang berusaha secara maksimal saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, c) hubungan interpedensi, yang mana hubungan ini berguna untuk mempermudah pemenuhan sumber daya dan pencapaian tujuan bersama, dan d) perpaduan kekuatan aktor yang terlibat untuk memperkuat kinerja (Taket et.al dalam Sari, 2017). Selanjutnya Gray (dalam Sari, 2017) menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen dalam pelaksanaan kolaborasi agar berjalan secara efektif. Ketiga elemen tersebut antara lain yaitu a) kolaborasi dapat mempermudah pencapain tujuan lembaga dengan relatif lebih mudah dan cepat, b) kolaborasi dapat meningkatkan hubungan antar lembaga yang terlibat, dan c) kolaborasi dapat mendorong terjadinya pengembangan lembaga yang terlibat. Oleh karena itu efektivitas dalam pelaksanaan kolaborasi akan berdampak pada setiap lembaga yang terlibat bergantung pada orientasi tujuan yang akan dihasilkan selama kolaborasi dilakukan. Penelitian ini membahas terkait dengan bagaimana efektivitas pada proses kolaborasi dalam implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pada proses kolaborasi dalam implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian efektivitas pada proses kolaborasi dalam implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul yaitu metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Untuk itu penelitian ini dilaukan pada KPDT atau Kantor Pengelolaan Data dan Telematika Kabupaten Bantul, CRI atau *Combine Resource*

---

*Institutions*, dan Kantor Pemerintah Desa Dlingo. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014). Dimana teknik analisis interaktif adalah proses analisis data yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data lapangan. Teknik ini terdapat empat tahapan yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Terakhir, teknik yang dilakukan untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, baik teknik triangulasi sumber dan teknik triangulasi teknik.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Program SID di Kabupaten Bantul merupakan salah satu bentuk inovasi digital yang dikembangkan dan diterapkan pada level instansi pemerintah desa. Saat ini inovasi digital SID telah diterapkan diseluruh desa di Kabupaten Bantul yang berjumlah sebanyak 75 pemerintah desa yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bantul. Kondisi geografis pada setiap pemerintah desa di Kabupaten Bantul nampaknya bukan menjadi hambatan dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID. Meskipun demikian, dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul dilakukan melalui skema kolaborasi dengan pihak yang lainnya. Praktik kolaborasi dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul dari hasil studi lapangan menunjukkan proses tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua tahapan. Tahapan pertama dilakukan kolaborasi secara mandiri oleh Pemerintah Desa Dlingo dengan CRI, sedangkan pada tahapan yang kedua dilakukan kolaborasi terpusat antara KPDT Kabupaten Bantul, CRI, dan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bantul. Oleh karena proses kolaborasi yang dilakukan menjadi dua tahapan, maka terdapat perbedaan antara tahapan kesatu dengan tahapan yang kedua. Setidaknya dapat diidentifikasi menjadi tiga perbedaan yang sangat mencolok dari kedua tahapan kolaborasi yang dilakukan dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul. Perbedaan tersebut antara lain yaitu pertama, kedua tahapan tersebut melibatkan pihak yang berbeda. Dimana tahapan kesatu melibatkan hanya Pemerintah Desa Dlingo dan CRI saja, sedangkan tahapan kedua melibatkan KPDT, CRI dan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bantul. Kedua, kedua tahapan tersebut memiliki faktor pendorong terjadinya kolaborasi yang berbeda. Dimana faktor pendorong pada tahapan kesatu yaitu faktor kebutuhan manajemen data desa pasca terjadinya bencana tsunami, sedangkan faktor pendorong pada tahapan kedua yaitu adanya kebijakan yang mengatur tentang pengembangan dan implementasi *electronic government* yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pada tahapan kedua ini faktor adanya kebijakan menjadi daya dorong

tersendiri oleh KPDT untuk mengembangkan inovasi digital SID yang diterapkan di seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bantul.

Ketiga, kedua tahapan tersebut memiliki tahapan kolaborasi yang berbeda. Dimana pada tahapan kesatu setidanya terdapat tiga tahapan kolaborasi. Tahapan tersebut yaitu tahapan pertama identifikasi masalah, tahapan kedua pendekatan, dan tahapan ketiga pembangunan. Dalam tahapan yang ketiga ini terdapat aktivitas pembangunan infrastruktur, pendampingan dan pemanfaatan inovasi digital SID, dan aktivitas pengembangan pada inovasi digital SID. Selanjutnya tahapan kolaborasi pada tahapan kedua yaitu tahapan yang pertama identifikasi program inovasi digital SID oleh KPDT, tahapan kedua pendekatan KPDT dengan setiap pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bantul, tahapan ketiga pembangunan terutama pembangunan infrastruktur, dan tahapan keempat sosialisasi yang dilakukan secara terpusat. Dalam tahapan sosialisasi ini juga dilakukan aktivitas pendampingan dan pelatihan kepada setiap pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bantul. Melalui kedua tahapan kolaborasi dalam proses pembangunan dan implementasi inovasi digital di Kabupaten Bantul, maka hingga saat ini seluruh desa di Kabupaten Bantul yang berjumlah 75 desa telah berhasil menerapkan inovasi digital SID. Berikut data jumlah inovasi digital SID yang telah diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Bantul.

**Tabel 2. Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bantul**

Desa	URL	Desa	URL
Poncosari	<a href="http://poncosari.bantulkab.go.id">http://poncosari.bantulkab.go.id</a>	Girirejo	<a href="http://girirejo.bantulkab.go.id">http://girirejo.bantulkab.go.id</a>
Trimurti	<a href="http://trimurti-bantul.desa.id">http://trimurti-bantul.desa.id</a>	Karangtalun	<a href="http://karangtalun.bantulkab.go.id">http://karangtalun.bantulkab.go.id</a>
Gadingsari	<a href="http://gadingsari.bantulkab.go.id">http://gadingsari.bantulkab.go.id</a>	Imogiri	<a href="http://imogiri-bantul.desa.id">http://imogiri-bantul.desa.id</a>
Gadingharjo	<a href="http://gadingharjo.bantulkab.go.id">http://gadingharjo.bantulkab.go.id</a>	Mangunan	<a href="http://mangunan-bantul.desa.id">http://mangunan-bantul.desa.id</a>
Srigading	<a href="http://srigading.bantulkab.go.id">http://srigading.bantulkab.go.id</a>	Muntuk	<a href="http://muntuk.bantulkab.go.id">http://muntuk.bantulkab.go.id</a>
Murtigading	<a href="http://murtigading.bantulkab.go.id">http://murtigading.bantulkab.go.id</a>	Dlingo	<a href="http://dlingo-bantul.desa.id">http://dlingo-bantul.desa.id</a>
Tirtomulyo	<a href="http://tirtomulyo.bantulkab.go.id">http://tirtomulyo.bantulkab.go.id</a>	Temuwuh	<a href="http://temuwuh.bantulkab.go.id">http://temuwuh.bantulkab.go.id</a>
Parangtritis	<a href="http://parangtritis.bantulkab.go.id">http://parangtritis.bantulkab.go.id</a>	Terong	<a href="http://terong.bantulkab.go.id">http://terong.bantulkab.go.id</a>
Donotirto	<a href="http://donotirto.bantulkab.go.id">http://donotirto.bantulkab.go.id</a>	Jatimulyo	<a href="http://jatimulyo.bantulkab.go.id">http://jatimulyo.bantulkab.go.id</a>
Tirtosari	<a href="http://tirtosari.bantulkab.go.id">http://tirtosari.bantulkab.go.id</a>	Baturetno	<a href="http://baturetno.bantulkab.go.id">http://baturetno.bantulkab.go.id</a>
Tirtoharjo	<a href="http://tirtoharjo-bantul.desa.id">http://tirtoharjo-bantul.desa.id</a>	Banguntapan	<a href="http://banguntapan.bantulkab.go.id">http://banguntapan.bantulkab.go.id</a>
Seloharjo	<a href="http://seloharjo.bantulkab.go.id">http://seloharjo.bantulkab.go.id</a>	Jagalan	<a href="http://jagalan.bantulkab.go.id">http://jagalan.bantulkab.go.id</a>
Panjangrejo	<a href="http://panjangrejo-bantul.desa.id">http://panjangrejo-bantul.desa.id</a>	Singosaren	<a href="http://singosaren.bantulkab.go.id">http://singosaren.bantulkab.go.id</a>
Srihardono	<a href="http://srihardono.bantulkab.go.id">http://srihardono.bantulkab.go.id</a>	Jambidan	<a href="http://jambidan.bantulkab.go.id">http://jambidan.bantulkab.go.id</a>
Sidomulyo	<a href="http://sidomulyo.bantulkab.go.id">http://sidomulyo.bantulkab.go.id</a>	Potorono	<a href="http://potorono-bantul.desa.id">http://potorono-bantul.desa.id</a>
Mulyodadi	<a href="http://mulyodadi.bantulkab.go.id">http://mulyodadi.bantulkab.go.id</a>	Tamanan	<a href="http://tamanan.bantulkab.go.id">http://tamanan.bantulkab.go.id</a>
Sumbermulyo	<a href="http://sumbermulyo.bantulkab.go.id">http://sumbermulyo.bantulkab.go.id</a>	Wirokerten	<a href="http://wirokerten-bantul.desa.id">http://wirokerten-bantul.desa.id</a>
Caturharjo	<a href="http://caturharjo-bantul.desa.id">http://caturharjo-bantul.desa.id</a>	Wonokromo	<a href="http://wonokromo.bantulkab.go.id">http://wonokromo.bantulkab.go.id</a>
Triharjo	<a href="http://triharjo.bantulkab.go.id">http://triharjo.bantulkab.go.id</a>	Pleret	<a href="http://pleret.bantulkab.go.id">http://pleret.bantulkab.go.id</a>
Gilangharjo	<a href="http://gilangharjo-bantul.desa.id">http://gilangharjo-bantul.desa.id</a>	Segoroyoso	<a href="http://segoroyoso.bantulkab.go.id">http://segoroyoso.bantulkab.go.id</a>

Wijirejo	<a href="http://wijirejo.bantulkab.go.id">http://wijirejo.bantulkab.go.id</a>	Bawuran	<a href="http://bawuran.bantulkab.go.id">http://bawuran.bantulkab.go.id</a>
Triwidadi	<a href="http://triwidadi.bantulkab.go.id">http://triwidadi.bantulkab.go.id</a>	Wonolelo	<a href="http://wonolelo.bantulkab.go.id">http://wonolelo.bantulkab.go.id</a>
Sendangsari	<a href="http://sendangsari.bantulkab.go.id">http://sendangsari.bantulkab.go.id</a>	Sitimulyo	<a href="http://sitimulyo.bantulkab.go.id">http://sitimulyo.bantulkab.go.id</a>
Guwosari	<a href="http://guwosari.bantulkab.go.id">http://guwosari.bantulkab.go.id</a>	Srimulyo	<a href="http://srimulyo.bantulkab.go.id">http://srimulyo.bantulkab.go.id</a>
Palbapang	<a href="http://palbapang.bantulkab.go.id">http://palbapang.bantulkab.go.id</a>	Srimartani	<a href="http://srimartani.bantulkab.go.id">http://srimartani.bantulkab.go.id</a>
Ringinharjo	<a href="http://ringinharjo.bantulkab.go.id">http://ringinharjo.bantulkab.go.id</a>	Pendowoharjo	<a href="http://pendowoharjo.bantulkab.go.id">http://pendowoharjo.bantulkab.go.id</a>
Bantul	<a href="http://bantul.bantulkab.go.id">http://bantul.bantulkab.go.id</a>	Timbulharjo	<a href="http://timbulharjo-bantul.desa.id">http://timbulharjo-bantul.desa.id</a>
Trirenggo	<a href="http://trirenggo.bantulkab.go.id">http://trirenggo.bantulkab.go.id</a>	Bangunharjo	<a href="http://bangunharjo.bantulkab.go.id">http://bangunharjo.bantulkab.go.id</a>
Sabdodadi	<a href="http://sabdodadi.bantulkab.go.id">http://sabdodadi.bantulkab.go.id</a>	Panggungharjo	<a href="http://panggungharjo-bantul.desa.id">http://panggungharjo-bantul.desa.id</a>
Patalan	<a href="http://patalan.bantulkab.go.id">http://patalan.bantulkab.go.id</a>	Bangunjiwo	<a href="http://bangunjiwo.bantulkab.go.id">http://bangunjiwo.bantulkab.go.id</a>
Canden	<a href="http://canden.bantulkab.go.id">http://canden.bantulkab.go.id</a>	Tirtonirmolo	<a href="http://tirtonirmolo-bantul.desa.id">http://tirtonirmolo-bantul.desa.id</a>
Sumberagung	<a href="http://sumberagung.bantulkab.go.id">http://sumberagung.bantulkab.go.id</a>	Tamantirto	<a href="http://tamantirto-bantul.desa.id">http://tamantirto-bantul.desa.id</a>
Trimulyo	<a href="http://trimulyo.bantulkab.go.id">http://trimulyo.bantulkab.go.id</a>	Ngestiharjo	<a href="http://ngestiharjo-bantul.desa.id">http://ngestiharjo-bantul.desa.id</a>
Selopamioro	<a href="http://selopamioro.bantulkab.go.id">http://selopamioro.bantulkab.go.id</a>	Argodadi	<a href="http://argodadi.bantulkab.go.id">http://argodadi.bantulkab.go.id</a>
Sriharjo	<a href="http://sriharjo.bantulkab.go.id">http://sriharjo.bantulkab.go.id</a>	Argorejo	<a href="http://argorejo.bantulkab.go.id">http://argorejo.bantulkab.go.id</a>
Wukirsari	<a href="http://wukirsari.bantulkab.go.id">http://wukirsari.bantulkab.go.id</a>	Argosari	<a href="http://argosari.bantulkab.go.id">http://argosari.bantulkab.go.id</a>
Kebonagung	<a href="http://kebonagung.bantulkab.go.id">http://kebonagung.bantulkab.go.id</a>	Argomulyo	<a href="http://argomulyo.bantulkab.go.id">http://argomulyo.bantulkab.go.id</a>
Karangtengah	<a href="http://karangtengah.bantulkab.go.id">http://karangtengah.bantulkab.go.id</a>		

Sumber : Kantor Pengelolaan Data dan Telematika, 2019

Dari hasil studi lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Bantul yang berjumlah 75 desa telah menerapkan inovasi digital SID dari tahun 2014. Meskipun telah diterapkan sejak tahun 2014, Pemerintah Desa Dlingo telah terlebih dahulu mengembangkan pada tahun 2006 dan berhasil menerapkan inovasi digital SID sejak tahun 2009. Hal ini menjelaskan bahwa inovasi digital SID yang berhasil dikembangkan dan diterapkan oleh Pemerintah Desa Dlingo merupakan daya tarik dari KPDT untuk mengembangkan inovasi digital SID yang diterapkan diseluruh desa di Kabupaten Bantul. Hal menarik yang terjadi dari pengembangan dan implementasi inovasi digital di Kabupaten Bantul yaitu keberagaman pada proses penerapan di setiap pemerintah desa. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap desa yang berbeda-beda. Oleh karenanya terdapat keterbatasan pada setiap pemerintah desa yang berpengaruh terhadap proses implementasi inovasi digital SID. Meskipun demikian, dalam proses penerapan inovasi digital SID di setiap pemerintah desa memiliki efektivitas bagi proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik bagi aparatur pemerintah desa maupun bagi masyarakat desa.

Efektivitas secara sederhana memberikan gambaran yang jelas sejauh mana inovasi digital SID dapat memiliki nilai kebermanfaatannya baik bagi aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu efektivitas memiliki pengaruh baik terhadap aparat pemerintah desa maupun terhadap masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan kebijakan tentang pemerintahan desa yang menjelaskan bahwa inovasi digital SID memiliki tujuan utama untuk memudahkan tugas pemerintah desa dalam

---

menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pengembangan dan implementasi inovasi digital SID diharapkan dapat memperbaiki manajemen data dan informasi desa yang mana data dan informasi desa tersebut dapat diakses oleh masyarakat maupun oleh seluruh pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu praktik kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital diharapkan dapat mendukung tujuan utama dalam kebijakan tersebut.

Sebagai instansi pemerintah yang paling kecil, pemerintah desa seharusnya menjadi piha yang paling paham dan mengetahui kondisi dan kebutuhan dari masyarakat desanya. Hal ini menjadi faktor utama keberhasilan dalam melakukan pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul. Terutama Pemerintah Desa Dlingo yang menjadi piha pertama yang sadar akan kebutuhan perbaikan manajemen data desa pasca terjadinya bencana alam tsunami. Perubahan yang ingin dilakukan dengan mengadopsi kemajuan TIK dalam proses manajemen data desa mampu merubah sistem manajemen data desa dari konvensional/tradisional menjadi suatu inovasi digital SID seperti saat ini. Kesadaran akan kebutuhan dan kondisi potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Dlingo menjadi kunci kesuksesannya dalam melakukan pengembangan dan implementasi inovasi digital SID. Keberhasilan tersebut menjadi daya tarik KPDT dalam mengupayakan inovasi digital SID dapat diterapkan diseluruh desa di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu setiap pemerintah desa seharusnya dapat mengoptimalkan keberadaan inovasi digital SID yang telah diterapkan untuk membantu dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Hal menarik yang terjadi di lapangan yaitu dengan adanya praktik kolaborasi dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul mengharuskan aparatur desa untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam memanfaatkan inovasi digital tersebut. Oleh karena itu penerapan inovasi digital SID diseluruh pemerintah desa mendorong terjadinya peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM aparatur desa dalam memanfaatkan inovasi digital SID. Hal ini terjadi untuk mengoptimalkan keberadaan inovasi digital SID pada setiap pemerintah desa. Selama ini pelayanan yang terjadi di setiap pemerintah desa mengalami berbagai macam permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, persyaratan dan prosedur pelayanan yang rumit, jam pelayanan yang tidak pasti dan adanya praktik pungutan oleh aparatur pemerintah desa. Kondisi ini membuat masyarakat semakin enggan yang berdampak pada terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama pemerintah desa. Selain itu kondisi ini semakin parah dengan tindakan masyarakat yang seolah acuh dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pengembangan

---

dan implementasi inovasi digital SID supaya memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat itu sendiri.

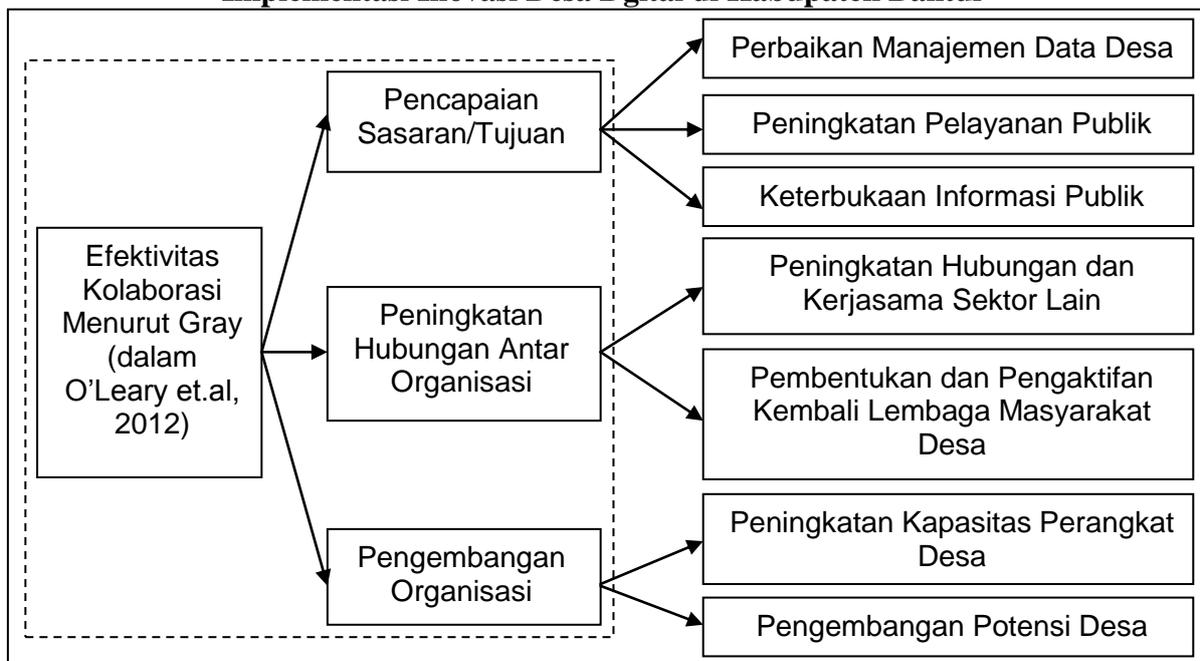
Setidaknya dari proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul memiliki tiga tujuan utama yang ingin diwujudkan. Ketiga tujuan utama tersebut antara lain yaitu a) inovasi digital SID diharapkan mampu memperbaiki manajemen data desa yang dulunya bersifat konvensional/manual/tradisional menjadi lebih modern dengan mengadopsi kemajuan TIK yang semain pesat, b) inovasi digital SID diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa dan mampu merubah citra pelayanan publik menjadi lebih baik, dan c) inovasi digital SID diharapkan mampu mendorong terwujudnya keterbukaan data dan informasi publik, sehingga dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan dengan mudah dan cepat. Ketercapaian dalam mewujudkan tujuan tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat sejauh mana efektivitas kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul. Selain mengidentifikasi dari tingkat ketercapaian tujuan utama, efektivitas kolaborasi dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital juga dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi baik pada aparatur pemerintah desa maupun pada masyarakat desa itu sendiri.

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk melihat efektivitas kolaborasi pada pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul menggunakan tiga indikator yang dikemukakan oleh Gray. Gray (dalam Sari, 2017) menjelaskan tiga elemen keberhasilan dalam proses kolaborasi yaitu pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditentukan oleh organisasi, peningkatan hubungan antara pihak yang terlibat, dan c) terwujudnya pengembangan suatu organisasi yang terlibat. Ketiga elemen tersebut merefleksikan antar organisasi yang terlibat memiliki faktor terjadinya akan suatu kolaborasi memiliki tujuan yang hendak dicapai yang berbeda-beda. Ketiga elemen tersebut secara signifikan dapat terlihat dari proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul. Dari proses kolaborasi yang dilakukan antara KPDT, CRI, dan seluruh pemerintah desa memberikan manfaat pada proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul.

Apabila merujuk pada penjelasan Gray tentang tiga elemen efektivitas kolaborasi, maka ketiga efektivitas tersebut terjadi pada proses kolaborasi dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul. Baik pada tahapan kesatu maupun tahapan kedua selama proses pengembangan dan implementasi inovasi digital setidaknya mencerminkan ketiga elemen efektivitas kolaborasi tersebut. Ketiga elemen tersebut, baik pencapaian tujuan/sasaran organisasi yang ingin dicapai, peningkatan hubungan antar pihak yang terlibat, maupun pengembangan organisasi pada proses kolaborasi dalam

pengembangan dan implementasi inovasi digital SID telah terwujud. Dimana pada setiap elemen efektivitas kolaborasi terwujud mewujudkan enam indikator yang teridentifikasi dari efektivitas kolaborasi dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital di Kabupaten Bantul. Efektivitas kolaborasi dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 1. Indikator Efektivitas Menurut Gray pada Proses Kolaborasi dalam Implementasi Inovasi Desa Dgital di Kabupaten Bantul**

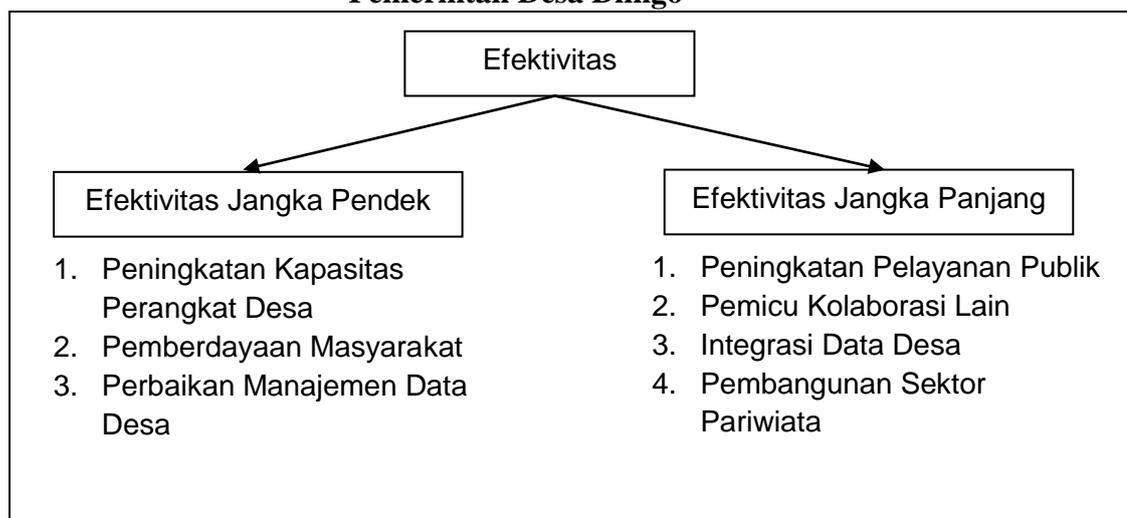


Sumber : Gray (dalam O'Leary et.al, 2012), Kantor Pengelolaan Data dan Telematika Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo dan *Combine Resource Institutions*, 2019 (diolah)

Pada gambar di atas menjelaskan bahwa pencapaian tujuan utama dari kolaborasi dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator turunan. Pada tujuan yang pertama, pencapaian tujua/sasaran oragnisasi yang telah ditetapkan terdapat dua indikator yaitu adanya kolaborasi yang dilakukan berdampak pada perbaikan manajemen data desa yang sebelumnya kovensional/manual/tradisional menjadi lebih modern. Selain itu dengan adanya pratik kolaborasi yang dilakukan maka dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa, dimana pelayanan kepada masyarakat dapat berubah menjadi lebih mudah, murah dan cepat. Tujuan yang terakhir yaitu dengan adanya praktik kolaborasi dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital dapat mendorong terwujudnya keterbukaan data dan informasi desa yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya pada tujuan yang kedua, terwujudnya peningkatan hubungan antar pihak yang terlibat terdapat dua indikator yaitu

dengan adanya praktik kolaborasi dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID mendorong terwujudnya peningkatan hubungan dengan pihak yang terlibat menjadi semakin harmonis bahkan mendorong terwujudnya proses kolaborasi pada program yang lainnya. Selain itu, dengan adanya kolaborasi tersebut mendorong terbentuknya organisasi pada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa. Adanya kolaborasi tersebut juga mendorong organisasi yang telah terbentuk pada masyarakat menjadi lebih aktif dan efektif. Pencapaian tujuan yang terakhir, pengembangan organisasi terdapat dua indikator yaitu dengan adanya praktik kolaborasi dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM aparatur desa menjadi lebih baik supaya dapat memanfaatkan inovasi digital SID dengan baik. Selain itu dengan adanya kolaborasi tersebut juga mendorong masyarakat desa untuk mengembangkan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Dari hasil identifikasi efektivitas pada kolaborasi dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul tersebut, maka dapat dikelompokkan menjadi efektivitas kolaborasi jangka pendek dan efektivitas kolaborasi jangka panjang. Efektivitas kolaborasi jangka pendek dan efektivitas kolaborasi jangka panjang dapat dijelaskan pada setiap pemerintah desa. Penjelasan efektivitas kolaborasi jangka pendek dan efektivitas kolaborasi jangka panjang dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Pemerintah Desa Dlingo dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2. Efektivitas Kolaborasi dalam Implementasi Inovasi Desa Digital di Pemerintah Desa Dlingo**



Sumber : Kantor Pengelolaan Data dan Telematika Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo dan *Combine Resource Institutions*, 2019 (diolah)

Merujuk pada hasil identifikasi efektivitas kolaborasi jangka pendek terdapat tiga indikator yaitu dengan adanya kolaborasi dapat mendorong peningkatan kapasitas dan

---

kemampuan aparatur desa, dalam hal ini yaitu kemampuan dan kapasitas dalam memanfaatkan TIK yang digunakan dalam inovasi digital SID. Sebelumnya segala proses administrasi dilakukan secara konvensional/manual/tradisional berubah menjadi lebih modern, sehingga menjadi suatu keharusan bagi setiap aparatur pemerintah desa untuk belajar beradaptasi memanfaatkan inovasi digital SID. Selain itu efektivitas kolaborasi jangka pendek kedua yaitu mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pemanfaatan inovasi digital SID. Terakhir yaitu terwujudnya perbaikan manajemen data desa yang semula menggunakan metode manual/tradisional/konvensional berubah menjadi lebih modern dengan memanfaatkan kemajuan TIK yang semakin pesat. Hal ini berdampak pada terwujudnya Pemerintah Desa Dlingo sebagai desa percontohan dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul. Selanjutnya untuk efektivitas kolaborasi jangka panjang dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Pemerintah Desa Dlingo yaitu dengan adanya proses kolaborasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga mendorong terjadinya kolaborasi dengan pihak dan program yang lainnya. Efektivitas jangka panjang lainnya terwujudnya integrasi data desa lintas sektor dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sampai pada pemerintah pusat. Terakhir terwujudnya pembangunan sektor pariwisata di Desa Dlingo oleh masyarakat sebagai pengembangan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Efektivitas kolaborasi jangka pendek dan efektivitas kolaborasi jangka panjang dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Pemerintah Desa Dlingo dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Efektivitas Jangka Pendek

Efektivitas jangka pendek dapat dilihat pada saat proses kolaborasi berlangsung maupun setelah kolaborasi dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID dilakukan. Efektivitas kolaborasi jangka pendek pada kolaborasi dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Pemerintah Desa Dlingo yaitu a) dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, b) terwujudnya pemberdayaan masyarakat, c) mampu memperbaiki manajemen data desa dan d) menjadikan Pemerintah Desa Dlingo sebagai desa percontohan dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID. Dari data di lapangan menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan dan penerapan SID di Desa Dlingo berdampak pada peningkatan kapasitas perangkat desa. Dimana dengan adanya pengembangan dan penerapan SID mengharuskan perangkat desa mampu beradaptasi dengan kemajuan TIK yang terjadi. Oleh karena itu perangkat desa harus mengikuti berbagai pelatihan maupun pendidikan baik formal maupun nonformal untuk dapat mengoperasikan berbagai perangkat untuk mendukung penerapan SID. Terdapat 5 orang aparatur Pemerintah Desa Dlingo yang mengikuti pendidikan pada Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta. Selain itu

---

juga terdapat 18 orang aparatur Pemerintah Desa Dlingo yang mengikuti pendidikan pada Sekolah SID (Sistem Informasi Desa) yang diselenggarakan oleh CRI.

Selain itu dalam proses kolaborasi yang dilakukan juga berdampak pada masyarakat secara umum. Hal ini dapat ditunjukkan dari terbentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan. Baik organisasi masyarakat yang lama kemudian aktif kembali dan organisasi masyarakat yang baru. Organisasi masyarakat yang lama di Desa Dlingo antara lain sebagai berikut : PKK, Karang Taruna, LPMD, Gapoktan, dan TKD. Sedangkan organisasi masyarakat yang baru terbentuk adalah Bina Seni dan Budaya, Sandigita IT, dan Guna Desa. Pemberdayaan yang terjadi lebih mengarah pada pemberdayaan pemuda di Des Dlingo. Hal ini dikarenakan pemuda merupakan kelompok yang melek teknologi. Efektivitas lainnya yaitu perbaikan manajemen data desa. Dimana sebelum adanya SID manajemen data desa yang digunakan masih bersifat manual konvensional, sedangkan setelah menggunakan SID berubah berbasis teknologi. Efektivitas yang terakhir yaitu Pemerintah Desa Dlingo menjadi desa percontohan karena keberhasilannya dalam melakukan pengembangan dan implementasi inovasi digital SID, sehingga inovasi digital SID tersebut saat ini telah diterapkan diseluruh desa di Kabupaten Bantul.

b. Efektivitas Jangka Panjang

Berdasarkan data di lapangan menunjukkan bahwa setidaknya terdapat empat efektivitas kolaborasi jangka panjang dari proses kolaborasi dalam pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Pemerintah Desa Dlingo. Keempat efektivitas kolaborasi tersebut antara lain a) peningkatan pelayanan publik, b) pemicu kolaborasi lain, c) integrasi data dan d) pembangunan sektor pariwisata. Pengembangan dan penerapan SID di Desa Dlingo yang pertama yaitu peningkatan pelayanan publik. Dimana dengan penerapan SID yang merubah pelayanan yang bersifat konvensional berubah menjadi digitalisasi. Hal ini memicu atau mendorong untuk melakukan berbagai macam pengembangan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang dulunya bersifat konvensional/manual/tradisional berubah menjadi lebih modern karena berbasis digital. Tetapi dalam pengembangan inovasi digital SID ini mengalami kendala pada proses integrasi data antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan bahkan pada pemerintah kabupaten. Oleh karena diperlukan adanya kolaborasi yang sinergis antar sektor untuk dapat terciptanya integrasi data dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya pengembangan dan penerapan inovasidigital SID di Desa Dlingo ini diprediksikan akan terjadi kolaborasi dengan berbagai sektor dalam segala hal. Mengingat saat ini banyak sekali kunjungan yang terjadi pada Pemerintah Desa Dlingo baik oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu dipastikan terjadinya kolaborasi atau kerjasama dengan sektor lain dalam berbagai bidang yang tentunya mengarah pada pengembangan berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Dlingo. Terakhir dengan adanya pengembangan

dan penerapan inovasi digital SID di Desa Dlingo juga diharapkan mampu mengembangkan sektor pariwisata. Mengingat bahwa Desa Dlingo terdapat potensi pariwisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi yang dimiliki oleh Desa Dlingo dapat dikelompokkan menjadi potensi pariwisata budaya, potensi pariwisata alam dan potensi pariwisata kuliner. Potensi pariwisata budaya yang dimiliki oleh Desa Dlingo yaitu jatilan, reyok, kethoprak, hadroh, sholawat Jawa, rodad, kirab budaya, genduren, wayangan, ronda thekthekek, gejok lesun dan angklung. Sedangkan potensi pariwisata alam yang dimiliki Desa Dlingo yaitu *river tubing* Kali Oya, grojogan Lepo, ngetek Kali Oya, *caving* Gua Njalakan, pohon purba kampung Jawa, gunung pasar Koripan, bukit cinta Mbelah, kebun buah Koripan, dan gardu pandang Koripan. Terakhir potensi pariwisata kuliner yang dimiliki oleh Desa Dlingo yaitu nasi tiwul, gatot, wedang kekep, jadah tempe, jamu herbal, aneka olahan sawo, aneka olahan garut, ingkung, gundangan dan sambel goreng. Oleh karena itu potensi pariwisata tersebut memiliki posisi yang sangat strategis untuk dikembangkan dan dipromosikan melalui SID. Potensi yang dimiliki baik potensi budaya, alam maupun kuliner sangat potensial untuk dikembangkan baik secara internal maupun melalui berbagai bentuk kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai sektor.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan salah satu bentuk inovasi digital di Kabupaten Bantul melalui skema kolaborasi. Proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul dilakukan oleh KPDT, CRI dan seluruh desa. Oleh karena itu inovasi digital SID telah diterapkan pada seluruh desa di Kabupaten Bantul sebanyak 75 desa dari tahun 2014. Meskipun demikian terdapat satu desa yang secara mandiri melalui skema kolaborasi dengan CRI telah berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi digital SID sejak dari tahun 2006 yaitu Pemerintah Desa Dlingo. Dari hasil di lapangan menunjukkan setidaknya dari proses kolaborasi yang dilakukan terdapat efektivitas kolaborasi dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Kabupaten Bantul. Sedangkan efektivitas yang terlihat pada level pemerintah desa dapat dikelompokkan menjadi efektivitas kolaborasi jangka pendek dan efektivitas kolaborasi jangka panjang. Efektivitas kolaborasi jangka pendek yang terjadi pada proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID di Pemerintah Desa Dlingo yaitu a) mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan SMD aparatur desa, b) terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa, c) mampu mendorong perbaikan manajemen data desa dan menjadikan Pemerintah Desa Dlingo menjadi desa percontohan di Kabupaten Bantul. Selanjutnya efektivitas kolaborasi jangka panjang dalam proses pengembangan dan implementasi inovasi digital SID yaitu a) mampu meningkatkan kualitas pada pelayanan masyarakat desa, b) mendorong terjadinya kolaborasi dengan pihak dan program yang

lainnya, c) mendorong terwujudnya integrasi data desa, dan d) mendorong pembangunan potensi sektor pariwisata yang dimiliki. Merujuk pada kesimpulan yang diambil pada penelitian ini, maka penulis memberikan saran yaitu a) seharusnya masyarakat dilibatkan dalam pemberdayaan yang dilakukan bukan hanya pada pemuda saja, b) Pemerintah Desa Dlingo sebaiknya melakukan pendekatan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan integrasi data menggunakan inovasi digital SID, dan c) Pemerintah Desa Dlingo seharusnya melakukan pengembangan diberbagai sektor bukan hanya fokus pada pengembangan inovasi berbasis digital saja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dermanto, Argyo. 2015. Efektivitas *Collaborative Governance* dalam Pelayanan Komprehensif Berkesinambungan untuk Menanggulangi HIV/AIDS. *Public Health Journal Vol. 9 No. 4*
- Eva, S dan Torfing, J. 2012. Collaborative Innovations in The Public Sector. *SAGE Publication*
- Holle, Errick S. 2011. Pelayanan Publik Melalui Elektronik Government : Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *Jurnal Sasi Vol 17 No 3*
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. Elektronik Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta : Andi
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan *E-government*
- O'leary, Rosemary dan Vij, Nindhi. 2012. Collabrotative Public Management : Where Have We Been and Where Are We Going?. *SAGE : The American Review of Public Administration 2012 42:507*. American Society for Public Administration
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Strategi Pengembangan Desa Digital
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)
- Rahman, Shams et.al. 2014. Determining Factors of E-government Implementation : A Multi-Criteria Decision-Making ApproachI. *Elsevier Science Publication*
- Rokhman, A. 2011. E-Government Adopttion in Developing Countriess : The Case of Indonesia. *CIS Publication*
- Safeena, R dan Abdullah, K. 2013. Conceptualization of Electronic Government Adoption. *International Journal of Managing Information Technology*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan *Open Source Software (OSS)*
- Taket, Anndan Leroy White. 2009. Partnership and Partisipation : Decision Making in the Multiagency Setting. *International Journal of Public Administration*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa